



ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERBASIS *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON SELATAN

Dewi Mahmuda

Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Corresponding Author: dewi12@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 03 September 2023</p> <p>Revised : 12 Oktober 2023</p> <p>Accepted : 02 November 2023</p> <p>Publication : 30 November 2023</p> <p>Keywords: Government Agency Performance Accountability Report, Value for Money, economy, efficiency, effectiveness</p> <p>Kata Kunci: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Value for Money, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>This study aims to determine the value for money-based government agency performance accountability report (LAKIP). The method is descriptive qualitative approach. The results is economic ratio in 2021 and 2022 all programs were declared economical. The 2021 and 2022 efficiency ratios show that the performance indicators of the percentage of job seekers placed and the percentage of labor productivity levels are declared inefficient and the performance indicators of the average percentage of the results of the achievement of the implementation of OPD support programs are declared efficient. The effectiveness ratio of 2021 and 2022 shows that the performance indicator of the percentage of job seekers placed is declared ineffective, the percentage of labor productivity level is declared effective and the average percentage of the results is achievement of the implementation of OPD supporting programs is declared balanced effective, 2022 performance percentage job seekers placed and of labor productivity level is declared effective and the performance indicator of the average percentage of the results of the achievement of the implementation of OPD supporting programs is declared balanced effective.</i></p> <p>Abstrak : Penelitian bertujuan untuk mengetahui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) berbasis <i>value for money</i>. Metodenya adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan rasio ekonomi pada 2021 dan 2022 seluruh program dinyatakan ekonomis. Rasio efisiensi 2021 dan 2022 menunjukkan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan tidak efisien dan indikator kinerja persentase rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efisien. Rasio efektivitas 2021 dan 2022 menunjukkan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan tidak efektif, persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan efektif dan persentase rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efektif berimbang, pada 2022 indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan efektif dan pada indikator kinerja persentase rerata hasil ketecapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efektif berimbang.</p>
---	--

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah dikatakan sebagai unsur dalam aparatur negara yang berkaitan dengan pemerintahan, instansi pemerintah merupakan bentuk dari pengabdian masyarakat terhadap pemerintah dalam membangun sesuai bidangnya. Instansi pemerintah adalah salah satu dari sumber penting dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam melaksanakan pembangunan nasional (*good governance*). Berhasil atau tidaknya instansi dalam mensukseskan dan mewujudkan pembangunan nasional didukung oleh beberapa faktor penting, diantaranya sistem pelaporan keuangan instansi dan kinerja instansi pemerintah (Setiawan, 2016:15).

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Arfan, 2014 :1). Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 yang membahas tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 yang membahas tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang Bersih, ekonomis, efektif, transparan, *responsive*, dan akuntabel.

Akuntabilitas publik pada biasanya bukan cuma hanya keahlian dalam menampilkan bagaimana uang publik bisa dipergunakan secara ekonomis, efisiensi dan efektif, namun akuntabilitas publik pula berkaitan dengan sesuatu kewajiban dalam membagikan informasi dan pertanggungjawabannya tentang apa yang sudah dibelanjakan serta yang lagi direncanakan oleh institusi pemerintah tersebut. Akuntabilitas publik ini pula bisa berfungsi untuk mengukur kinerja suatu institusi pemerintahan sehingga bisa diketahui sejauh mana kinerja pelayanan publik sudah dilaksanakan. Dalam rangka penerapan gunanya, institusi pemerintah sangat diharapkan untuk bisa merancang strategi untuk tingkat mutu serta kuantitas kinerjanya dalam penuhi kebutuhan publik. Oleh sebab itu pula dibutuhkan perkakas ataupun prosedur guna mengukur sesuatu kinerja institusi pemerintah sehingga bisa diketahui sejauh mana kenaikan mutu kinerja sudah dilaksanakan (Rahman, 2021 : 2).

Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo dalam Fitriani, 2017:2).

Tuntutan akan kualitas kinerja pada pemerintah daerah dapat dinilai menggunakan konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersamaan. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berarti perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Efisiensi, berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang baik (Wadoe, 2021:2).

Value for Money (WVM) dapat tercapai apabila suatu organisasi telah menggunakan *input* paling rendah untuk mencapai *output* paling maksimal sebagai bentuk pencapaian tujuan organisasi. Dan selain *Value for Money* (WFM), dikenal istilah akuntabilitas. Yang merupakan *output* penilaian kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang wajib dilaporkan. Kinerja pemerintah ini dibuat atau direncanakan sesuai dengan Restra (Rencana Strategis) dengan jangka waktu 5 tahun (Masyhuri, 2022:4).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis suatu instansi, dimana laporan tersebut disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun. Dalam penyusunan

LAKIP, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Adapun salah satu manfaat dari LAKIP ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran (Widianto dan Karina, 2021:2).

Bersumber dari Baubaupost.com, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara telah melakukan penilaian kinerja terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara secara resmi menyerahkan hasil penilaian kepatuhan tahun 2022 kepada Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan. Acara penyerahan hasil penilaian tersebut dihadiri oleh PJ Bupati Buton Selatan La Ode Budiman, SKM., M.MKes beserta jajaran kepala dinas terkait. Dalam laporannya, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah memenuhi nilai akhir dan zona 56,31 Kategori C indikator kepatuhan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, PJ Bupati Buton Selatan La Ode Budiman, SKM., M.MKes. meminta kepada OPD yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan segera melakukan evaluasi, khususnya dalam kinerja pelayanan publik, penyerapan anggaran, realisasi output dan akuntabilitas kinerja lebih diperhatikan.

Karena kinerja instansi pemerintah merupakan sebuah cerminan pencapaian sasaran, visi, misi, dan strategi, menunjukkan keberhasilan serta kegagalan dalam melaksanakan kegiatan/program yang telah ditetapkan atau direncanakan. Kinerja-kinerja tersebut akan dilaporkan secara berkala untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja di masa mendatang, hal ini sesuai dengan maksud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menguji tingkat akuntabilitas kinerja yang ada di instansi pemerintah Kabupaten Buton Selatan, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Adapun instansi pemerintah di Kabupaten Buton Selatan yang menarik perhatian peneliti adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton. Hal ini dikarenakan Disnakertrans merupakan instansi yang berperan penting dalam mengelola sumber daya manusia dan mendukung mobilitas penduduk. Instansi

ini umumnya menangani masalah terkait ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan, pengawasan kondisi kerja serta pengelolaan transmigrasi penduduk antar daerah. Selain itu, instansi ini harus membuat dan melaporkan akuntabilitas kinerja instansi dalam bentuk LAKIP yang dibuat setiap tahun anggaran.

Karena kinerja pemerintah tidak hanya dilihat dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersamaan. Maka dalam hal ini, penulis akan menggunakan konsep *Value for Money* (WFM) untuk menguji kinerja pemerintah melalui LAKIP yang dibuat. *Value for Money* (WFM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berbasis *Value for Money* Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berbasis *Value for Money* Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berbasis *Value for Money* Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan yang beralamat di Jalan Poros Batauga, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2017: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan.

Menurut sugiyono (2017: 81), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 sampai 2022.

Menurut Sugiyono (2017: 45), jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif.

1. Data Kualitatif.

Menurut Sugiyono (2017: 45), data kualitatif adalah yang berbentuk kata, skema dan gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini yang digunakan adalah penekanan wawancara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan.

2. Data Kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2017: 45), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah berupa data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan.

Menurut Sugiyono (2017: 45), sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer.

Menurut Sugiyono (2017: 48), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dari informan dan dokumentasi berupa gambar di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder.

Menurut Sugiyono (2017: 48), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder pada penelitian ini ialah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021-2022, jurnal, *literature*, skripsi, serta buku terdahulu yang berkaitan dengan penelitian analisis *Value for Money* pada pengukuran kinerja sektor publik sebagai penunjang pada penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2017: 63), dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah). Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, berperan serta wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data untuk bahan analisis dilakukan dengan cara:

1. Wawancara.

Menurut Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang dilakukan secara lisan dan dijawab secara lisan juga. Sehingga peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun informan yang akan diwawancara yaitu Plt.kepala dinas, kepala bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, kepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan kepala bidang transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan. Dari metode ini diharapkan dapat memperoleh informasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan.

2. Dokumentasi.

Metode dokumentasi ialah suatu tahap didalam mengumpulkan data dengan cara memfotocopy dokumen atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang diterima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan.

3. Kepustakaan (*Liblary Research*).

Data diperoleh melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian seperti; buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, undang-undang, peraturan pemerintah dan sumber data tertulis baik tercetak maupun elektronik.

Dalam menganalisis data penulis memakai metode deskriptif yaitu, menganalisa dan mengumpulkan data, yang kemudian disusun berdasarkan kelompoknya agar data-data tersebut bisa diteliti dengan berdasarkan teori yang relevan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dan kemudian akan memperoleh kesimpulan. Pada tahap pertama dari penelitian, dilakukannya pengumpulan data seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), lalu data diolah serta dihitung atau dianalisis dengan menggunakan indikator *Value for Money* untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan. Hasil dari perhitungan yang didapatkan kemudian dijabarkan kedalam bentuk kata untuk mendeskripsikan makna dari angka yang telah didapat dari hasil perhitungan tersebut.

Indikator *value for money* pada pengukuran kinerja organisasi sektor publik terdiri dari tiga yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Berikut cara menghitung dari ketiga indikator tersebut:

1. Rumus ekonomi menurut (Mahmudi, 2015: 84):

$$Ekonomi = \frac{Input}{Nilai Input} \times 100\%$$

keterangan:

Input : Realisasi anggaran daerah yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Nilai *Input* : Anggaran Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut ekonomis yaitu sebagai berikut (Mahsun, 2016:186):

- Dinyatakan ekonomis apabila ditemukan nilai kurang dari 100%
 - Dinyatakan ekonomis berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%
 - Dinyatakan tidak ekonomis apabila ditemukan nilai lebih dari 100%
2. Rumus efisiensi menurut (Mahmudi 2015:85), yaitu:

$$efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

keterangan:

Output : Presentase capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan 2021-2022.

Input : Presentase capaian anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut efisiensi yaitu sebagai berikut (Mahsun 2016:187):

- Dinyatakan tidak efisien apabila ditemukan nilai kurang dari 100%
 - Dinyatakan efisien berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%
 - Dinyatakan efisien apabila ditemukan nilai lebih dari 100%
3. Rumus efektivitas menurut (Mahmudi 2015:85), yaitu:

$$efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Presentase realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Output : Presentase target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut efektif yaitu sebagai berikut (Mahsun, 2016:187):

- a. Dinyatakan tidak efektif apabila ditemukan nilai kurang dari 100%
- b. Dinyatakan efektivitas berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%
- c. Dinyatakan efektif apabila ditemukan nilai lebih dari 100%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan pemaparan hasil dari pengolahan data sesuai dengan cara mengukur atau menilai kinerja menggunakan metode *value for money* yaitu pengukuran ekonomi, pengukuran efisiensi, dan pengukuran efektivitas.

Hasil Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi membutuhkan data-data tentang anggaran pengeluaran dan realisasinya. Untuk mencocokkan seberapa besar tingkat ekonomi suatu anggaran berdasarkan pengeluaran yang ekonomi suatu anggaran dibutuhkan rumus matematis di bawah ini (Mahmudi, 2015: 84):

$$Ekonomi = \frac{Input}{Nilai Input} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran daerah yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Nilai *Input* : Anggaran Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Menurut Mahsun (2016:186) Kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut ekonomis yaitu sebagai berikut:

- a. Dinyatakan ekonomis apabila ditemukan nilai kurang dari 100%
- b. Dinyatakan ekonomis berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%
- c. Dinyatakan tidak ekonomis apabila ditemukan nilai lebih dari 100%

Pengukuran rasio ekonomi berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022 adalah:

Tabel 4.5 Peng. Ekonomi Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab Buton Selatan 2021

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Rasio (%)	Ket
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	53.361.500	53.272.000	99,83	Ekonomis
		Program Penempatan Tenaga Kerja	255.150.500	255.147.500	99,99	Ekonomis
2.	Persentase Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	64.856.200	64.346.000	99,21	Ekonomis
		Program Hubungan Industrial	137.375.000	136.995.500	99,72	Ekonomis
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	55.640.000	55.479.000	99,71	Ekonomis
3.	Persentase rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.301.152.983	1.200.862.602	92,29	Ekonomis

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.5. hasil perhitungan LAKIP tingkat rasio ekonomi dengan menggunakan metode *Value for Money* menunjukkan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2021 dinyatakan “ekonomis” karena rasio ekonomi kurang dari seratus 100%.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bapak Ruslan Tarfin, S.STP pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 pukul 11.00 WITA. mengatakan bahwa: *“Pelaksanaan penganggaran yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan yaitu disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian disusun dalam rencana kerja anggaran (RKA). Dengan disusunnya anggaran belanja langsung tentu akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat karena belanja langsung adalah anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat”*

Senada dengan hal diatas, hasil wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan, Ibu Wa Ode Heni Anggraini, S.Sos pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 10.00 WITA, mengatakan bahwa :

“Perhitungan untuk program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 telah berjalan secara ekonomis. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan selalu mengidentifikasi potensi birokrasi yang tidak perlu atau hambatan administratif yang dapat dikurangi sehingga anggaran yang diberikan oleh pemerintah bisa digunakan dan direalisasikan dengan baik. Hal ini bisa dilihat juga pada realisasi anggaran yang ada pada LAKIP tahun 2021, untuk anggaran seluruh program yang diberikan oleh APBD-P sebesar Rp.1.867.536.183 dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.1.766.102.602, artinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan untuk tahun 2021 menghemat anggaran APBD-P sebesar Rp.101.433.581”.

Tabel 4.6 Pengukuran Ekonomi Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab Busel 2022

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Rasio (%)	Keterangan
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	170.000.000	168.000.000	98,82	Ekonomis
		Program Penempatan Tenaga Kerja	77.807.000	77.709.000	99,87	Ekonomis
2.	Persentase Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	18.900.000	18.900.000	100	Ekonomis Seimbang
		Program Hubungan Industrial	101.549.400	100.993.500	99,45	Ekonomis
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	31.625.000	31.625.000	100	Ekonomis Seimbang
3.	Persentase rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.496.059.295	1.485.834.852	99,31	Ekonomis

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.6. hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio ekonomi tahun 2022 dengan menggunakan metode *Value for Money* menunjukkan bahwa pada persentase tingkat produktifitas tenaga kerja terdapat 2 program dinyatakan “ekonomis seimbang” karena

nilai sama dengan 100% dan 4 program lainnya dinyatakan “ekonomis” karena nilai kurang dari 100%.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Plt.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan, Ibu Wa Ode Heni Anggraini, S.Sos pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 10.00 WITA, mengatakan bahwa :*“Untuk 2 program yang dinyatakan ekonomis seimbang yaitu program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program perencanaan kawasan transmigrasi anggaran yang diberikan oleh APBD-P digunakan sepenuhnya oleh Dinas dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelatihan unit kopetensi yang diikuti oleh kurang lebih 20 orang membutuhkan biaya yang cukup dan untuk 4 program lainnya Dinas bisa melakukan penghematan anggaran. Total anggaran APBD-P untuk seluruh program yang ada pada tahun 2022 sebesar Rp.1.895.940.695 dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.1.883.062.352 untuk itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan untuk Tahun 2022 bisa menghemat anggaran APBD-P sebesar Rp.12.878.343”*

Hasil Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dapat diukur dengan perbandingan antara *output* (hasil yang dicapai) dengan *input* (realisai anggaran). Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Output adalah hasil diperoleh dari aktivitas, program, serta kebijakan. Sehingga pada penelitian ini *output* dimaksud ialah hasil yang ada pada aktivitas. *Input* diperbandingkan dengan *output* agar menetapkan tingkatan efisiensi merupakan tingkat dari angka dibandingkannya anggaran serta realisasi anggarannya. Menurut Mahmudi (2015:85) rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi adalah:

$$efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

keterangan:

Output : Persentase capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan 2021-2022.

Input : Persentase capaian anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Menurut Mahsun (2016:187) Kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut efisiensi yaitu sebagai berikut:

- a. Dinyatakan tidak efisien apabila ditemukan nilai kurang dari 100%
- b. Dinyatakan efisien berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%
- c. Dinyatakan efisien apabila ditemukan nilai lebih dari 100%

Pengukuran rasio efesiensi berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022 adalah:

Tabel 4.7. Pengukuran Efesiensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Nilai Rasio (%)	Keterangan
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	99,97	40,10	40,11	Tidak Efisien
2.	Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	99,59	80	80,32	Tidak Efisien
3.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	92,29	100	108,3	Efisien

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.7. hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efesiensi tahun 2021 dengan menggunakan metode *Value for Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan “tidak efisien” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan kurang dari 100% dan pada indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program OPD dinyatakan “efisien” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan lebih dari 100%.

Hal tersebut diatas didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bapak Alimin, S.Sos.,M.Si pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.00 WITA yang mengatakan bahwa : *“Seluruh kinerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan bisa diukur kinerjanya baik output maupun outcomenya sehingga bisa dikatakan efisien atau tidak. Kinerja yang baik dapat dikatakan efisien jika nilai kinerjanya lebih dari 100%. Efisien diartikan sebagai penggunaan input yang minimal dengan pencapaian output yang optimal oleh karena itu, dapat dilihat untuk tahun 2021 indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat*

produktifitas tenaga kerja memerlukan anggaran yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dikatakan tidak efisien, sedangkan pada indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD bisa menghasilkan kinerja yang optimal dengan keluaran atau anggaran yang ekonomis sehingga dikatakan efisien”

Tabel 4.8. Pengukuran Efisiensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Nilai Rasio (%)	Keterangan
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	99,15	78,04	99,63	Tidak Efisien
2.	Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	99,63	560	562,07	Efisien
3.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	99,31	100	100,69	Efisien

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.8. hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efisiensi tahun 2022 dengan menggunakan metode *Value for Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan “tidak efisien” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan kurang dari 100% dan pada indikator kinerja persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program OPD dinyatakan “efisien” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan lebih dari 100%.

Hal tersebut diatas didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bapak Alimin, S.Sos.,M.Si pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.00 WITA yang mengatakan bahwa : *“Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesienkan biaya yang dikeluarkan dari pemerintah. Untuk Tahun 2022 indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan membutuhkan anggaran yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan target yang ditetapkan sedangkan pada indikator persentase tingkat produktivitas tenaga kerja dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD bisa menghasilkan*

kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran yang ekonomis sehingga dapat dikatakan efisien”

Hasil Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil memenuhi sasarannya, sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut telah beroperasi secara efektif. Jadi efektivitas tidak menentukan mengenai berapa banyak biaya yang keluar selagi pencapaian tujuan tersebut. Tapi efektivitas melihat bagaimana organisasi tersebut sudah memenuhi tujuan yang diharapkan (Mardiasmo, 2018: 134). Menurut Mahmudi (2015: 187) tingkat efektivitas bisa diukur melalui rumus:

$$efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Persentase realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Output : Persentase target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Menurut Mahsun (2016:187) kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut efektif yaitu sebagai berikut:

- Dinyatakan tidak efektif apabila ditemukan nilai kurang dari 100%
- Dinyatakan efektivitas berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%
- Dinyatakan efektif apabila ditemukan nilai lebih dari 100%

Pengukuran rasio efektivitas berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022 adalah:

Tabel 4.9. Pengukuran Efektivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2021

No.	Indikator Kinerja	Outcome (%)	Output (%)	Nilai Rasio (%)	Keterangan
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	40,10	71	56,47	Tidak Efektif
2.	Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	80	50	160	Efektif
3.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100	100	100	Efektif Berimbang

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.9, hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efektivitas tahun 2021 dengan menggunakan metode *Value for Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan “tidak efektif” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan kurang dari 100%, persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan “efektif” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan lebih dari 100% dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program OPD dinyatakan “efektif berimbang” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan sama dengan 100%.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bapak Ruslan Tarfin, S.STP pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 pukul 11.00 WITA. mengatakan bahwa: *”Memang pada indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2021 tidak efektif dikarenakan selain belum berakhirnya pandemi covid-19 juga karena tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan Pendidikan SMA ke bawah serta kurangnya informasi yang didapatkan dari para pencari kerja yang sudah terdaftar bekerja atau belum bekerja. Meskipun demikian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan selalu berupaya dalam memfasilitasi dan melayani masyarakat”*

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bapak Alimin, S.Sos.,M.Si pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.00 WITA, mengatakan bahwa *“Pada indikator kinerja produktifitas tenaga kerja tahun 2021 dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi target capaian dari 50% dan terealisasi 80% hal ini dikarenakan adanya juga dukungan dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja (Kendari) berupa pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 1 Kelas Pelatihan Menjahit yang bisa meningkatkan keterampilan dan menambah nilai produktivitas masyarakat dalam hal keahlian serta kompetisi yang ada”* Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Transmigrasi, Bapak Aludin, SKM pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 pukul 10.00 WITA, mengatakan bahwa: *“Pada indikator kinerja Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD tahun 2021 sudah tercapai dengan target yang ditetapkan 100% dan realisasinya 100%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan*

selalu berupaya agar pelayanan publik kepada masyarakat dan juga dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan untuk pelaporan pertanggungjawaban terlealisasi dengan sebaik mungkin untuk memastikan akuntabilitas yang baik dalam pelaksanaan program pendukung OPD”.

Tabel 4.10. Pengukuran Efektivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022

No.	Indikator Kinerja	Outcome (%)	Output (%)	Nilai Rasio (%)	Keterangan
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	78,04	75	104,05	Efektif
2.	Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	560	55	101,81	Efektif
3.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100	100	100	Efektif Berimbang

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan table 4.10, hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efektivitas tahun 2022 dengan menggunakan metode *Value for Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan “efektif” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan lebih dari 100% dan pada persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan “efektif berimbang” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan sama dengan 100%.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bapak Ruslan Tarfin, S.STP pada hari Rabu, Tanggal 21 Februari 2024 pukul 11.00 WITA, mengatakan bahwa: *“Pada indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 sudah mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya lowongan pekerjaan dari sektor pertambangan sehingga membuka peluang bagi angkatan kerja ataupun pengangguran yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Akan tetapi ada kendala yang terjadi pada penempatan tenaga kerja dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan dari para pencari kerja yang sudah terdaftar bekerja atau belum bekerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tetap melakukan monitoring dan evaluasi agar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Buton Selatan menurun”*

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bapak Alimin, S.Sos.,M.Si pada hari Senin, Tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.00 WITA, mengatakan bahwa: *“Pada indikator persentase tingkat produktifitas tenaga kerja sudah terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP Kendari) berupa pelatihan berbasis kompetisi sebanyak 7 kelas yang diikuti oleh 112 orang dan bisa menambah nilai produktivitas masyarakat dalam keahlian dan kompetensi yang ada”*

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Transmigrasi, Bapak Aludin, SKM pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 pukul 10.00 WITA, mengatakan bahwa: *“Pada indikator kinerja persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD Tahun 2022 sudah mencapai target yaitu 100% dan terealisasi 100%. Meskipun terkendala kurangnya Sumber Daya Manusia dan Koordinasi dalam penyusunan anggaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Selatan selalu berupaya agar seluruh proses administrasi yang akan dilaporkan bisa terealisasi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya”*.

Pembahasan

Rasio Ekonomi

Berdasarkan analisis data, dapat diketahui bahwa dari sisi ekonomi seluruh seluruh Program yang ada pada sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan memperoleh perhitungan ekonomi yang sangat baik. Hasil analisis menunjukkan 6 program yang telah dilaksanakan dinyatakan ekonomis yaitu memperoleh nilai kurang dari 100%. Dan pada hasil analisis data perhitungan LAKIP pada tingkat rasio ekonomi tahun 2022 dengan menggunakan metode *value for money* menunjukkan pada sasaran strategis persentase tingkat produktifitas tenaga kerja terdapat 2 program dinyatakan ekonomis seimbang dengan nilai sama dengan 100% dan 4 program lainnya dinyatakan ekonomis dengan nilai kurang dari 100% persen. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Buton Selatan mampu menggunakan dana dengan hemat, yaitu untuk tahun 2021 menghemat anggaran APBD-P sebesar Rp.101.433.581 dan untuk tahun 2022 menghemat anggaran APBD-P sebesar Rp.12.878.343.

Hasil tersebut diatas berdasarkan dengan kriteria kinerja sektor publik yang diberikan oleh Mahsun (2016:186). Kinerja sektor publik dapat dinyatakan ekonomis

apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen, jika rasio yang dicapai sama dengan seratus persen dikatakan ekonomis seimbang dan jika rasio yang dicapai nilainya lebih dari seratus persen dikatakan tidak ekonomis. Menurut Valdino R (2023 :18) Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Semakin kecil rasio ekonomi berarti kinerja suatu sektor publik semakin baik. Kegiatan operasional suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan ekonomis jika mampu menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Rasio Efisiensi

Berdasarkan analisis data, dapat diketahui hasil perhitungan LAKIP pada tingkat rasio efisiensi tahun 2021 dengan menggunakan metode *value for money* menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan tidak efisien karena pada hasil perhitungan nilainya kurang dari 100% dan pada indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program OPD dinyatakan efisien karena hasil perhitungan nilainya lebih dari 100%.

Hasil perhitungan LAKIP pada tingkat rasio efisien tahun 2022 dengan menggunakan metode *value for money* menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan tidak efisien karena hasil perhitungan nilainya kurang dari 100% dan pada indikator kinerja persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program OPD dinyatakan efisien karena hasil perhitungan nilainya lebih dari 100%.

Hasil tersebut diatas berdasarkan dengan kriteria kinerja sektor publik yang diberikan oleh Mahsun (2016:187). Kinerja sektor publik bisa dikatakan efisien jika rasio yang dicapai lebih dari seratus persen, dikatakan efisien berimbang jika rasio yang dicapai sama dengan seratus persen dan dikatakan tidak efisien jika rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Menurut Pratiwi (2016:7) Efisiensi diartikan sebagai penggunaan *input* yang minimal dengan pencapaian *output* yang optimal. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dan *input* yang dihubungkan dengan target atau standar kerja yang telah ditetapkan.

Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil analisis data, hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efektivitas tahun 2021 dengan menggunakan metode *Value for Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan tidak efektif karena hasil perhitungan nilainya kurang dari 100%, persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan efektif karena hasil perhitungan nilainya lebih dari 100% dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program OPD dinyatakan efektif berimbang karena pada hasil perhitungan nilainya sama dengan 100%.

Hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efektivitas tahun 2022 dengan menggunakan metode *Value for Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan efektif karena hasil perhitungan nilainya lebih dari 100% dan pada persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efektif berimbang karena hasil perhitungan nilainya sama dengan 100%.

Hasil tersebut diatas berdasarkan dengan kriteria kinerja sektor publik yang diberikan oleh Mahsun (2016:187). Kinerja sektor publik bisa dikatakan efektif jika rasio yang dicapai lebih dari 100%, dikatakan efektif seimbang jika rasio yang dicapai sama dengan 100% dan dikatakan tidak efektif jika rasio yang dicapai kurang dari 100%. Menurut Mardiasmo (2018: 134), Efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil memenuhi sasarannya, sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut telah beroperasi secara efektif. Jadi efektivitas tidak menentukan mengenai berapa banyak biaya yang keluar selagi pencapaian tujuan tersebut. Tapi efektivitas melihat bagaimana organisasi tersebut sudah memenuhi tujuan yang diharapkan (Mardiasmo, 2018: 134).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berbasis *Value for Money* Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 seluruh program dinyatakan ekonomis dan tahun 2022 terdapat 4 program dinyatakan ekonomis yaitu

- program perencanaan tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 2 program dinyatakan ekonomis seimbang yaitu program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program perencanaan kawasan transmigrasi.
2. Rasio Efisiensi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 menunjukkan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktivitas tenaga kerja dinyatakan tidak efisien dan indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efisien. Pada tahun 2022 menunjukkan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan tidak efisien dan pada indikator kinerja persentase tingkat produktivitas tenaga kerja dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efisien.
 3. Rasio Efektivitas pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 menunjukkan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan tidak efektif, persentase tingkat produktivitas tenaga kerja dinyatakan efektif dan persentase rata-rata hasil ketecapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efektif berimbang. Pada tahun 2022 indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktivitas tenaga kerja dinyatakan efektif dan pada indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efektif berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D., & Subardjo, A. (2017). KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM MENGUKUR KINERJA PELAYANAN SEKTOR PUBLIK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(6).
- Arfan, D. A. (2014). ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM PENGUKURAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2011-2012. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Arusani, A., Kusuma, U. W. ., & Harimau, L. I. . (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And*

Entrepreneur, 1(02), 123–136.

<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.53>

- Baubaupost.com. (2023). PJ BUPATI BUTON SELATAN LA ODE BUDIMAN TERIMA NILAI KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK DARI OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SULTRA, ADA PENINGKATAN KINERJA DI BANDING TAHUN 2022. diakses pada 1 Februari 2024. dari <https://baubaupost.com/66388/pj-bupati-busel-la-ode-budiman-terima-nilai-kepatuhan-pelayanan-publik-dari-ombudsman-ri-perwakilan-sultra-ada-peningkatan-kinerja-di-banding-tahun-2022/busel/2023/03/10/09>
- Erawan Adi Saputra. (2022). AKUNTANSI PENERIMAAN DANA DAN PENGELOLAAN DANA PADA BANK MANDIRI SYARIAH KOTA BAUBAU. *Jiem : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 1(01), 38–61. <https://doi.org/10.62668/jiem.v1i01.148>
- Fitriani. (2017). ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM PENGUKURAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BULUKUMBA. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hasanah, U., Hidayat, M. T. (2023). PENGUKURAN KINERJA DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY SEBAGAI PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA DINAS SOSIAL SURABAYA TAHUN 2017-2021). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(3), 2673-2693.
- Indriaswari, L. K. (2017). ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM PENGUKURAN KINERJA PADA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN 2014-2016. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.
- Mahmudi, R. (2015). MANAJEMEN KINERJA SEKTOR PUBLIK EDISI KEDUA. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Muhamad. (2016). PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. BPFE Anggota IKAPI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.

- Masyhuri, M. R. (2022). ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Monalisa, M. (2024). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BIAYA LINGKUNGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN PT. BINTANG INTERNASIONAL KENDARI. *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 1(02), 190–211. <https://doi.org/10.62668/jiem.v1i02.1064>
- Pratiwi, W. (2016). AUDIT SEKTOR PUBLIK. Bogor: In Media.
- Rahman, W. A. (2021). ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Ramadhani, R. (2022). ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU. Universitas Islam Riau.
- Rais R, M. . (2024). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LANGKOMU KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH KABUPATEN BUTON TENGAH. *JIM : Journal Of International Management*, 2(01), 1–25. <https://doi.org/10.62668/jim.v2i01.1070>
- Rudi Abdullah. (2022). ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2017-2021. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 37–44. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.124>
- Rudi Abdullah. (2022). ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI TERHADAP PENINGKATAN LABA PADA PT. MARINA MART KENDARI. *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 1(01), 01–21. <https://doi.org/10.62668/jiem.v1i01.146>
- Rudi Abdullah. (2022). PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA KANTOR INSPEKTORAT

- KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(01), 1–20. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i01.129>
- Setiawan, A. B., & Gustia, W. (2016). ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI BOGOR. *Jurnal akunida*, 2(2), 14-26.
- Sri Wani. (2022). ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG PADA CV. CITRA NIAGA CEMERLANG. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(01), 38–55. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i01.131>
- Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF DAN R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). METODE PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF DAN R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suyono, S., Abbas, B. ., & Putera, A. . (2024). PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, MANAJEMEN KONFLIK DAN KOMITMEN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 01–19. <https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1013>
- Syafitri, L. (2021). ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Syamsir, S., Razak, A., & Yunus, A. (2024). PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, PENGAWASAN DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I MOLAWA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 20–39. <https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1012>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PEMERINTAH DAERAH.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.
- Valdino R, F. (2023). ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA PAREPARE. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Wadoe, B. W. Y. (2021). ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM PENGUKURAN KINERJA DI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2017-2019. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Wildani, R. W. (2019). PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY PADA DINAS ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN. Kota Batu: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Zhafirah, A. (2022). ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Zulhelmy, H., Arif, E., & Garini, N. T. (2021). ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 198-211.